

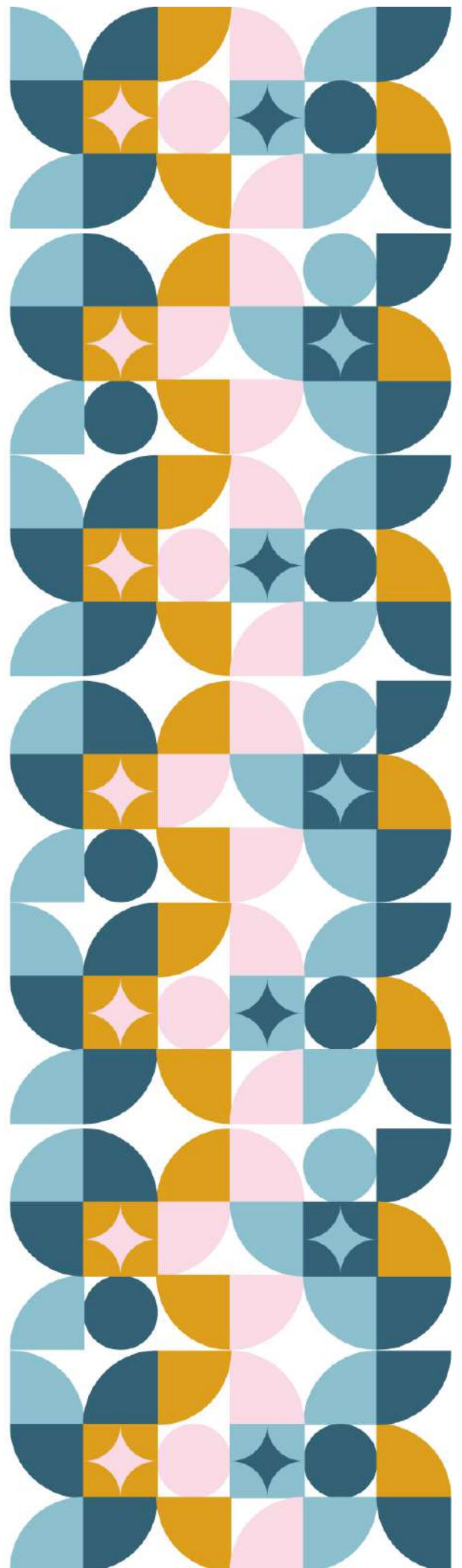
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BPAFK SURABAYA

2024

☎ 031-5035830

✉ bpfk-surabaya@kemkes.go.id

🌐 www.bpfk-sby.org



KATA PENGANTAR

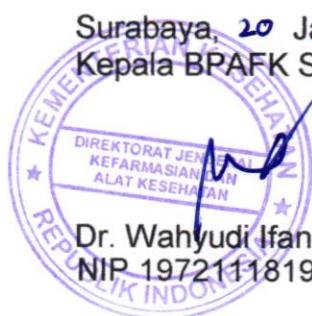
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, 20 Januari 2025
Kepala BPAFK Surabaya



Dr. Wahyudi Ifani, ST, M.Si
NIP 197211181999031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	40
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	53
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	66
F. Pengungkapan Penting Lainnya	68
VI. Lampiran dan Daftar	

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

JL. KARANGMENJANGAN NO. 22 SURABAYA JAWA TIMUR
TELEPON 031 5035830, 5014638, FAXIMILE 0315021002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 20 Januari 2025
Kepala BPAFK Surabaya



Dr. Wahyudi Ifani, ST, M.Si
NIP 197211181999031003

Laporan Keuangan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp20.101.830.562 atau mencapai 134,01 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 15.000.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp28.582.930.862 atau mencapai 90,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp31.748.430.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun Anggaran 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.900.492.803 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp672.197.131; Aset Tetap (neto) sebesar Rp30.078.929.265; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp149.366.407. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp140.358.175 dan Rp30.760.134.628.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp19.410.289.263, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp30.193.717.289 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp10.783.428.026). Defisit Kegiatan Non Operasional dan

Surplus/(Defisit) Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp572.584.201) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp11.356.012.227).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp0, defisit-LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp11.356.012.227). ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp42.116.146.855 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp30.760.134.628.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024			%	2023			%
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PENDAPATAN								
Penerimaan Negara Bukan Pajak	15,000,000,000	20,101,830,562	5,101,830,562	134.01	-	-	-	#DIV/0!
JUMLAH PENDAPATAN	15,000,000,000	20,101,830,562	5,101,830,562	134.01	-	-	-	#DIV/0!
BELANJA								
Belanja Pegawai	12,511,005,000	11,973,780,406	(537,224,594)	95.71	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	14,831,562,000	12,264,884,025	(2,566,677,975)	82.69	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal	4,405,863,000	4,344,266,431	(61,596,569)	98.60	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
JUMLAH BELANJA	31,748,430,000	28,582,930,862		90.03	-	-		#DIV/0!

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
NERACA
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	0,00
Piutang Bukan Pajak	127.143.000	-	127.143.000	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(127.143.000)	-	(127.143.000)	0,00
Persediaan	672.197.131	-	672.197.131	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	672.197.131	-	672.197.131	-
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	97.260.876.937	-	97.260.876.937	0,00
Gedung dan Bangunan	10.113.788.525	-	10.113.788.525	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.500.000	-	67.500.000	0,00
Aset Tetap Lainnya	277.103.703	-	277.103.703	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(77.640.339.900)	-	(77.640.339.900)	0,00
JUMLAH ASET TETAP	30.078.929.265	-	30.078.929.265	-
ASET LAINNYA				
Aset Tidak Berwujud	820.490.099	-	820.490.099	0,00
Dana yang dibatasi penggunaannya	91.530.000	-	91.530.000	0,00
Aset Lain-Lain	930.626.120	-	930.626.120	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1.693.279.812)	-	(1.693.279.812)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	149.366.407	-	149.366.407	-
JUMLAH ASET	30.900.492.803	-	30.900.492.803	-
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Kepada Pihak Ketiga	140.358.175	-	140.358.175	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	140.358.175	-	140.358.175	-
JUMLAH KEWAJIBAN	140.358.175	-	140.358.175	-
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	30.760.134.628	-	30.760.134.628	0,00
JUMLAH EKUITAS	30.267.521.276	-	30.267.521.276	0,00
JUMLAH EKUITAS	30.760.134.628	-	30.760.134.628	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30.900.492.803	-	30.900.492.803	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	19.410.289.263	-	19.410.289.263	
JUMLAH PENDAPATAN	19.410.289.263	-	19.410.289.263	
BEBAN				
Beban Pegawai	11.973.780.406	-	11.973.780.406	
Beban Persediaan	836.675.814	-	836.675.814	
Beban Barang dan Jasa	4.451.612.434	-	4.451.612.434	
Beban Pemeliharaan	2.261.783.420	-	2.261.783.420	
Beban Perjalanan Dinas	4.851.940.726	-	4.851.940.726	
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.482.277.989	-	6.482.277.989	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(664.353.500)	-	(664.353.500)	
JUMLAH BEBAN	30.193.717.289	-	30.193.717.289	
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10.783.428.026)	-	(10.783.428.026)	
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(599.772.000)	-	(599.772.000)	
Pendapatan Pelepasan Aset	-	-	-	
Beban Pelepasan Aset	599.772.000	-	599.772.000	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	27.187.799		27.187.799	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	27.187.799	-	27.187.799	
Beban dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-	
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(572.584.201)	-	(572.584.201)	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(11.356.012.227)	-	(11.356.012.227)	
POS LUAR BIASA	-		-	
Beban Luar Biasa	-		-	
POS LUAR BIASA	-	-	-	
SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.356.012.227)	-	(11.356.012.227)	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT LO	(11,356,012,227)	0	(11,356,012,227)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	42,116,146,855	0	42,116,146,855	0
KENAIKAN PENURUNAN EKUITAS	30,760,134,628	0	30,760,134,628	0
EKUITAS AKHIR	30,760,134,628	0	30,760,134,628	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sebagai satuan kerja dibawah Eselon 1 Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI mempunyai

1. VISI BPAFK Surabaya

“Menjadi Lembaga Pengamanan Fasilitas Kesehatan Berstandar Internasional”

2. MISI BPAFK Surabaya

1. Menyediakan layanan yang bermutu , terpercaya dan inovatif dalam bidang inspeksi, pengujian, kalibrasi dan sertifikat fasilitas kesehatan;
2. Mewujudkan fasilitas kesehatan yang aman;
3. Menjamin mutu dan penapisan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan;
4. Memperkuat kemitraan dalam pengelolaan mutu alat kesehatan di tingkat regional.

3. TUJUAN BPAFK Surabaya

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan penggunaan alat kesehatan Radiasi dan Non Radiasi
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Meningkatkan pengelolaan yang mandiri, akuntabel dan independen.

4. SASARAN STRATEGIS BPFK Surabaya

- a. Tercapainya pelayanan prima, cepat, tepat dan akurat dan ramah serta pola tariff yang menarik.
- b. Tercapainya target pelayanan di bidang pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana serta monitoring radiasi perorangan.
- c. Tercapainya peningkatan cakupan wilayah dan kecepatan pelayanan.
- d. Tercapainya pengamanan peralatan kesehatan pre market.
- e. Terselenggaranya jejaring rujukan regional, nasional dan internasional.
- f. Tercapainya keamanan dan keselamatan penggunaan alat kesehatan Radiasi dan Non radiasi di sarpelkes.
- g. Terselenggaranya program inti manajemen.
- h. Terciptanya produk pelayanan yang bermutu dengan biaya terjangkau dan kompetitif.
- i. Terwujudnya akuntabilitas wajar tanpa pengecualian.
- j. Tercapainya penilaian yang obyektif terkait mutu dan keamanan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan.

5. STRATEGI MENCAPAI SASARAN STRATEGIS BPFK Surabaya

- a. Pelayanan prima
- b. Peningkatan utilisasi sarana prasarana dan peralatan pengujian dan kalibrasi
- c. Inovasi, serta diferensiasi dan diversifikasi layanan.

- d. Peningkatan peran jejaring laboratorium.
- e. Pembinaan proaktif ke seluruh stake holder di wilayah binaan.
- f. Penyelenggaraan manajemen SDM yang profesional.
- g. Sistem informasi elektronik
- h. Kemandirian dan akuntabilitas organisasi dalam melaksanakan operasional pelayanan melalui BLU.
- i. Independensi organisasi dalam melaksanakan operasional pelayanannya.

6. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPAFK Surabaya

1. Tugas Pokok :

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan telah diubah menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta.

2. Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
- d. kalibrasi alat ukur standar;
- e. pengujian produk perbekalan kesehatan rumah tangga;
- f. pengamanan radiasi dan pengukuran luaran radiasi;
- g. inspeksi sarana produksi, sarana distribusi, dan

- sarana penguji alat kesehatan;
- h. inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga;
- i. inspeksi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;
- j. pengendalian mutu layanan pengujian alat dan fasilitas kesehatan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis;
- l. pelaksanaan kerja sama;
- m. pengelolaan data dan informasi;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang PAFK.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

•Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

•Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan

sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan

Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA dikarenakan adanya:

1. Revisi Penambahan anggaran belanja barang untuk kegiatan Inspeksi Sarana Distribusi Alat Kesehatan Non-PIE paska sertifikasi CDAKB
2. Penambahan Anggaran Belanja pegawai untuk kekurangan Belanja Pegawai
3. Revisi Penambahan anggaran belanja barang dalam hal penggunaan RO SBKU (Kegiatan Layanan BMN)

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	15,000,000,000	15,000,000,000
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	15,000,000,000	15,000,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	10,897,769,000	12,511,005,000
Belanja Barang	14,615,431,000	14,831,562,000
Belanja Modal	4,405,863,000	4,405,863,000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	29,919,063,000	31,748,430,000

Realisasi

Pendapatan

Rp20.101.830.5

62

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp20.101.830.562 atau mencapai 134,01 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000. Pendapatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya terdiri dari :

1. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan standardisasi di Bidang Kesehatan sebesar Rp20.036.393.810
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp173.000. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan sewa rumah dinas yang terdiri dari Pendapatan sewa rumah dinas bulan Januari-Februari 2024 sebesar Rp173.000 (disetor ke negara berdasarkan billing Simponi nomor 820240202516962 dan NTPN Nomor 2D8652G4VPBN7IF2 Tanggal 02 Februari 2024).
3. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 20.661.812 merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas TA 2023 (pengembalian disetor ke negara berdasarkan billing Simponi nomor 820240223834450 dan NTPN Nomor B6ACE3CIFJUNV4AI Tanggal 23 Februari 2024).
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp6.525.987 terdiri dari :
 - a. Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2023 untuk 13 Pegawai sebesar Rp 1.575.087,- (pengembalian disetor ke negara berdasarkan billing Simponi nomor 820240201441417 dan NTPN Nomor 091816U8EU7K7O49 Tanggal 02 Februari 2024).
 - b. Pengembalian Tunjangan Umum Pegawai TA 2023 sebesar Rp 4.950.900 untuk 3 Pegawai (Pengembalian disetor ke kas negara melalui potongan SPM No. 00322T/690805/2024 Tgl 23 Juli 2024 SP2D No. 241351302007355 Tanggal 24 Juli 2024).
5. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp38.075.953. Pendapatan ini

adalah Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah, yang terdiri dari :

- a. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari CV Matra Cipta untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Perapian dan Grouping Instalasi Elektrikal Gedung Lab BPAFK Surabaya sebesar Rp886.770 (denda disetor ke negara melalui potongan SPM No. 00644T/690805/2024 Tgl 18 November 2024 SP2D No. 241351301023074 Tanggal 20 November 2024).
- b. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari CV Matra Cipta untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Renovasi Interior Ruang Penerimaan Alat Datang BPAFK Surabaya sebesar Rp26.234 (denda disetor ke negara melalui potongan SPM No. 00560T/690805/2024 Tgl 22 Oktober 2024 SP2D No. 241351301020615 Tanggal 24 Oktober 2024).
- c. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari CV Matra Cipta untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Penambahan Kanopi Gudang TU dan Gedung Laboratorium BPAFK Surabaya sebesar Rp270.929 (denda disetor ke negara melalui potongan SPM No. 00559T/690805/2024 Tgl 22 Oktober 2024 SP2D No. 241351301020614 Tanggal 24 Oktober 2024).
- d. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari CV Mas Textile untuk pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai sebesar Rp705.320 (denda disetor ke negara melalui potongan SPM No. 00794T/690805/2024 Tgl 21 Desember 2024 SP2D No. 241351302014292 Tanggal 27 Desember 2024).

- e. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari PT Quantum Inti Akurasi untuk Pengadaan Alat Pengujian dan Kalibrasi sebesar Rp36.186.700 (denda disetor ke negara melalui potongan SPM No. 00724T/690805/2024 Tgl 09 Desember 2024 SP2D No. 241351302013587 Tanggal 11 Desember 2024).

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2024**

No	Uraian	TW III TAHUN ANGGARAN 2024		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan standardisasi di Bidang Kesehatan	15,000,000,000	20,036,393,810	133.58
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	173,000	#DIV/0!
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	38,075,953	#DIV/0!
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	20,661,812	#DIV/0!
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	6,525,987	#DIV/0!
Jumlah		15,000,000,000	20,101,830,562	134.01

Realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 mencapai 133,58% dari target yang ditentukan karena meningkatnya jumlah layanan pengujian dan kalibrasi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya selama Tahun Anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi,

dan Standardisasi di Bidang Kesehatan TA 2023, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Adanya pergantian eselon menyebabkan perubahan kode satker dan nama satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dan dianggap sebagai satker baru sehingga nilai pembandingan dengan Tahun anggaran 2023 adalah Rp0. Proses likuidasi telah dilakukan dari Satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai BAST No. KN.01.06/E.X/2915/2024 Tgl 31 Mei 2024

Perbandingan Realisasi Pendapatan

TA 2024 dan TA 2023

NO	URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan standardisasi di Bidang	20,036,393,810	-	#DIV/0!
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	173,000	-	#DIV/0!
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	38,075,953	-	#DIV/0!
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	20,661,812	-	#DIV/0!
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	6,525,987	-	#DIV/0!
Jumlah		20,101,830,562	-	#DIV/0!

*Realisasi
Belanja Negara
Rp
28.582.930.862*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp28.582.930.862 atau 90,03% dari anggaran belanja sebesar Rp31.748.430.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	12,511,005,000	11,985,077,583	95.80
Belanja Barang	14,831,562,000	12,379,394,273	83.47
Belanja Modal	4,405,863,000	4,344,266,431	98.60
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	31,748,430,000	28,708,738,287	90.43
Pengembalian		(125,807,425)	-
Jumlah	31,748,430,000	28,582,930,862	90.03

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Adanya pergantian eselon menyebabkan perubahan kode satker dan nama satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dan dianggap sebagai satker baru sehingga nilai pembandingan dengan Tahun anggaran 2023 adalah Rp0. Proses likuidasi telah dilakukan dari Satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai BAST No. KN.01.06/E.X/2915/2024 Tgl 31 Mei 2024

*Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	11,973,780,406	-	#DIV/0!
Belanja Barang	12,264,884,025	-	#DIV/0!
Belanja Modal	4,344,266,431	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	28,582,930,862	-	#DIV/0!

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp11.973.780.406 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.973.780.406 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2023, realisasi belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Adanya pergantian eselon menyebabkan perubahan kode satker dan nama satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dan dianggap sebagai satker baru sehingga nilai pembandingan dengan Tahun anggaran 2023 adalah Rp0. Proses likuidasi telah dilakukan dari Satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai BAST No. KN.01.06/E.X/2915/2024 Tgl 31 Mei 2024

*Perbandingan Belanja Pegawai
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	3,757,889,000	-	#DIV/0!
Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,990	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	317,297,890	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Anak PNS	82,646,142	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Struktural PNS	17,640,000	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Fungsional PNS	205,530,000	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. PPh PNS	59,741,029	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Beras PNS	207,121,200	-	#DIV/0!
Belanja Uang Makan PNS	333,622,000	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	542,975,000	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Umum PNS	139,820,000	-	#DIV/0!
Belanja Gaji Pokok PPPK	407,416,000	-	#DIV/0!
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,125	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	31,475,600	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Anak PPPK	8,404,608	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	52,220,000	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Beras PPPK	27,664,440	-	#DIV/0!
Belanja Uang Makan PPPK	46,473,000	-	#DIV/0!
Belanja Uang Lembur	67,828,000	-	#DIV/0!
Belanja Uang Lembur PPPK	3,293,000	-	#DIV/0!
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,130,321,111	-	#DIV/0!
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	545,641,448	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	11,985,077,583	-	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Pegawai	(11,297,177)	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	11,973,780,406	0	#DIV/0!

Belanja Barang

Rp12.264.884.02

5

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.264.884.025 dan Rp0. Jika dibandingkan realisasi belanja barang TA 2023, realisasi belanja barang pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Adanya pergantian eselon menyebabkan perubahan kode satker dan nama satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dan dianggap sebagai satker baru sehingga nilai pembanding dengan Tahun anggaran 2023 adalah Rp0. Proses likuidasi telah dilakukan dari Satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

sesuai BAST No. KN.01.06/E.X/2915/2024 Tgl 31 Mei 2024

Perbandingan Belanja Barang

TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2,791,346,356	0	#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional	568,592,880	0	#DIV/0!
Belanja Jasa	1,990,372,780	0	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan	2,065,815,096	0	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4,963,267,161	0	#DIV/0!
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	0	-
Jumlah Belanja Kotor	12,379,394,273	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja	(114,510,248)		
Jumlah Belanja	12,264,884,025	0	#DIV/0!

Belanja Modal

Rp4.344.266.431

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.344.266.431 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jika dibandingkan realisasi belanja modal TA 2023, realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Adanya pergantian eselon menyebabkan perubahan kode satker dan nama satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dan dianggap sebagai satker baru sehingga nilai pembanding dengan Tahun anggaran 2023 adalah Rp0. Proses likuidasi telah dilakukan dari Satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai BAST No. KN.01.06/E.X/2915/2024 Tgl 31 Mei 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,937,805,000	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	369,806,135	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	36,655,296	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	4,344,266,431	0	#DIV/0!
Pengembalian	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	4,344,266,431	0	#DIV/0!

*Belanja Modal
Tanah Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Jika dibandingkan realisasi belanja modal tanah TA 2023, realisasi belanja modal tanah pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Adanya pergantian eselon menyebabkan perubahan kode satker dan nama satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dan dianggap sebagai satker baru sehingga nilai pembanding dengan Tahun anggaran 2023 adalah Rp0. Proses likuidasi telah dilakukan dari Satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai BAST No. KN.01.06/E.X/2915/2024 Tgl 31 Mei 2024

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp
3.937.805.000*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.937.805.000 dan Rp0. Jika dibandingkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2023,

realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Adanya pergantian eselon menyebabkan perubahan kode satker dan nama satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dan dianggap sebagai satker baru sehingga nilai pembandingan dengan Tahun anggaran 2023 adalah Rp0. Proses likuidasi telah dilakukan dari Satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai BAST No. KN.01.06/E.X/2915/2024 Tgl 31 Mei 2024

Perbandingan Realisasi Belanja
Modal Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,937,805,000	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	3,937,805,000	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	3,937,805,000	0	#DIV/0!

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp
369.806.135*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp369.806.135 dan Rp0. Jika dibandingkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2023, realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Adanya pergantian eselon menyebabkan perubahan kode satker dan nama satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dan dianggap sebagai

satker baru sehingga nilai pembanding dengan Tahun anggaran 2023 adalah Rp0. Proses likuidasi telah dilakukan dari Satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai BAST No. KN.01.06/E.X/2915/2024 Tgl 31 Mei 2024 .

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 adalah Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa renovasi gedung layanan yang terdiri dari :

1. Pekerjaan perapian dan grouping Instalasi Elektrikal Gedung Lab senilai Rp189.862.300;
2. Renovasi Interior Ruang Penerimaan Alat Datang senilai Rp 41.096.605;
3. Penambahan Kanopi penghubung Gudang TU dan Gedung Laboratorium senilai Rp138.847.230.

Perbandingan Realisasi Belanja

Modal Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	369,806,135	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	369,806,135	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	369,806,135	0	#DIV/0!

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Jika dibandingkan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan TA 2023, realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Adanya pergantian eselon menyebabkan perubahan kode

satker dan nama satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dan dianggap sebagai satker baru sehingga nilai pembandingan dengan Tahun anggaran 2023 adalah Rp0. Proses likuidasi telah dilakukan dari Satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai BAST No. KN.01.06/E.X/2915/2024 Tgl 31 Mei 2024 .

*Belanja Modal
Lainnya
Rp36.655.296*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar adalah sebesar Rp36.655.296 dan Rp0. Jika dibandingkan realisasi belanja modal lainnya TA 2023, realisasi belanja modal lainnya Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Adanya pergantian eselon menyebabkan perubahan kode satker dan nama satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dan dianggap sebagai satker baru sehingga nilai pembandingan dengan Tahun anggaran 2023 adalah Rp0. Proses likuidasi telah dilakukan dari Satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai BAST No. KN.01.06/E.X/2915/2024 Tgl 31 Mei 2024 . Realisasi belanja modal lainnya merupakan realisasi pengadaan dokumen acuan metode kerja BPFK Surabaya TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Dokumen Acuan Metode Kerja	36,655,296	0	100.00
Jumlah Belanja Kotor	36,655,296	0	100.00
Pengembalian	-	-	0.00
Jumlah Belanja	36,655,296	0	100.00

Belanja

Bantuan Sosial

Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 adalah sebesar Rp0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31-Dec-24	31-Dec-23
Kuitansi yang belum di GU	-	-
Uang di Rekening Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNB
Rp127.143.000*

C.2 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp127.143.000 dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNB per 31 Desember 2024 BPFK Surabaya terdiri dari Piutang Kalibrasi sebesar Rp113.643.000 dan Piutang TLD Badge senilai Rp13.500.000. Piutang sebesar 127.143.0000 semuanya dalam kondisi macet.

Piutang macet BPAFK Surabaya belum bisa diajukan PPNTD dan pengurusannya ke PUPN karena masih terdapat piutang macet yang belum lengkap dokumennya. Tetapi upaya-upaya yang lain telah dilakukan untuk mengurangi adanya piutang macet tersebut, antara lain:

1. BPAFK Surabaya mendatangi faskes yang mempunyai piutang macet untuk melakukan konfirmasi serta penyelesaian atas piutang macet tersebut.
2. Melakukan identifikasi terhadap saldo pembayaran PNBP yang belum teridentifikasi identitas pembayarnya.

Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP
Per 31 Desember 2024 & Per 31 Desember 2023*

Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023
Piutang Kalibrasi	113,643,000	-
TLD Badge	13,500,000	-
Jumlah	127,143,000	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak
Rp127.143.000*

C.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp127.143.000 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Per
31 Desember 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	127,143,000	100%	127,143,000
Jumlah	127,143,000		127,143,000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	127,143,000	-	127,143,000

Persediaan
Rp672.197.131

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp672.197.131 dan Rp0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan
Per 30 September 2024 dan Per 31 Desember 2023

Jenis	30 September 2024	31 Des 2023
Barang Konsumsi	672,197,131	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya/Bahan Baku	-	-
Jumlah	672,197,131	-

Dari nilai barang konsumsi sebesar Rp672.197.131, terdapat persediaan berupa amplop yang bernilai paling besar diantara barang persediaan lainnya yaitu sebesar sebesar Rp101.880.110. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan
Mesin
Rp97.260.876.9
37

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp97.260.876.937 dan Rp0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	3,937,805,000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	93,749,850,037
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	426,778,100
Saldo per 31 Desember 2024	97,260,876,937
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(73,119,696,303)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	24,141,180,634

Terdapat mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin.
Mutasi tambah terdiri dari :

1. Pengadaan alat Pengolah Data total nilai Rp378.600.000 dengan rincian :
 - a. 7 Unit Laptop senilai Rp161.000.000
 - b. 3 Unit PC Desktop/All In One PC senilai Rp60.600.000
 - c. 4 Unit Multifunction Printer senilai Rp70.000.000
 - d. 5 Unit Scanner senilai Rp60.000.000
 - e. 1 Unit Harddisk Cloud senilai Rp27.000.000
2. Pengadaan Inventaris Kantor total nilai Rp257.615.000 dengan rincian :
 - a. 3 Unit Meja Kerja Leter L senilai Rp21.450.000
 - b. 9 Unit Meja Kerja 1 Biro senilai Rp33.750.000
 - c. 1 Unit Meja Penerimaan Alat Datang senilai Rp5.300.000
 - d. 8 Unit Kursi Kerja Berroda senilai Rp17.520.000
 - e. 1 Unit Kompresor senilai Rp8.950.000
 - f. 1 Unit High Pressure Cleaner senilai Rp2.250.000
 - g. 1 Unit Jam Dinding Digital senilai Rp1.150.000
 - h. 2 Unit Dispenser Alat senilai Rp4.570.000
 - i. 1 Unit TV 32 Inchi senilai Rp2.590.000

- j. 1 Unit Mesin Absensi senilai Rp3.200.000
 - k. 2 Unit AC 1 PK senilai Rp10.400.000
 - l. 2 Unit AC 2 PK senilai Rp16.800.000
 - m. 1 Unit Sofa 2 Seater senilai Rp7.250.000
 - n. 2 Unit Koper Alat senilai Rp8.800.000
 - o. 2 Unit Brankas Alat senilai Rp6.500.000
 - p. 1 Unit Smart Board senilai Rp82.000.000
 - q. 1 Unit Koper Alat (kecil) senilai Rp3.850.000
 - r. 1 Unit Water Heater senilai Rp2.125.000
 - s. 2 Unit Meja Lab senilai Rp19.160.000
3. Pengadaan Alat Pengujian dan Kalibrasi total nilai Rp3.301.590.000 dengan rincian:
- a. 1 Unit Vibration Meter senilai Rp11.200.000
 - b. 1 Unit Push Pull Force senilai Rp17.000.000
 - c. 2 Unit Termometer Celup senilai Rp10.800.000
 - d. 1 Unit Electrical Tester senilai Rp499.500.000
 - e. 1 Unit Stop Watch senilai Rp2.350.000
 - f. 1 Unit Radiation Meter senilai Rp567.210.000
 - g. 1 Unit Sourcecheck 4 Pi Vented-Type Chamber connecting system TNC senilai Rp282.000.000
 - h. 1 Unit Unidos Tango Connecting System TNC senilai Rp635.000.000
 - i. 1 Unit CTDI Phantom senilai Rp78.980.000
 - j. 1 Unit Inclinator senilai Rp2.450.000
 - k. 1 Unit Gas O2 Analyzer senilai Rp199.000.000
 - l. 1 Unit Test Probe Kit senilai Rp44.000.000
 - m. 1 Unit Tachometer for Scaler senilai Rp26.000.000
 - n. 1 Unit Alat Kalibrasi Spectrofotometer senilai Rp306.000.000
 - o. 1 Unit Ball Pressure Test Kit senilai Rp10.000.000
 - p. 1 Unit Creepage and Clearance Gauge Sett senilai Rp27.500.000

- q. 1 Unit Optical Comparator senilai Rp17.300.000
- r. 1 Unit Torque Driver senilai Rp25.200.000
- s. 5 Unit Thermohygrobarometer senilai Rp66.500.000
- t. 4 Unit Radiometer Phototherapy senilai Rp258.400.000
- u. 1 Unit CT Simulator (ELEKTRON DENSITY PHANTOM) senilai Rp120.400.000
- v. 2 Unit Spectrochromameter senilai Rp94.800.000

Mutasi kurang peralatan dan mesin TA 2024 senilai Rp 426.778.100 merupakan reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan yang terdiri dari :

NO	URAIAN	NILAI
1	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	178,000.
2	ALAT UKUR	950,000.
3	ALAT KANTOR	12,279,000.
4	ALAT RUMAH TANGGA	74,552,000.
5	ALAT STUDIO	587,000.
6	ALAT KOMUNIKASI	484,000.
7	PERALATAN PEMANCAR	1,028,000.
8	ALAT KEDOKTERAN	5,553,000.
9	ALAT KESEHATAN UMUM	274,000.
10	UNIT ALAT LABORATORIUM	11,435,000.
11	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	901,000.
12	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	257,000.
13	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	205,000.
14	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	483,000.
15	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1,793,000.
16	KOMPUTER UNIT	273,815,600.
17	PERALATAN KOMPUTER	42,003,500.
TOTAL		426,778,100.

**Gedung dan
Bangunan
Rp10.113.788.5
25**

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Des 2023 adalah Rp10.113.788.525 dan Rp0. Terdapat mutasi tambah transaksi Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	369,806,135
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	369,806,135
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	9,743,982,390
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	10,113,788,525
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1,482,184,195)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	8,631,604,330

Mutasi tambah transaksi Gedung dan Bangunan adalah penambahan nilai gedung dan bangunan berupa renovasi gedung layanan yang terdiri dari :

1. Pekerjaan perapian dan grouping Instalasi Elektrikal Gedung Lab senilai Rp189.862.300;
2. Renovasi Interior Ruang Penerimaan Alat Datang senilai Rp 41.096.605;
3. Penambahan Kanopi penghubung Gudang TU dan Gedung Laboratorium senilai Rp138.847.230.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp67.500.000*

C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Des 2023 adalah Rp67.500.000 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah terhadap transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	67,500,000
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 September 2024	67,500,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	(4,218,755)
Nilai Buku per 30 September 2024	63,281,245

*Aset Tetap
Lainnya
Rp
277.103.703*

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Des 2023 adalah Rp277.103.703 dan Rp0. Mutasi nilai aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Pembelian Dokumen Acuan Kerja	11,552,899
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	298,284,814
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	32,734,010
Saldo per 31 Desember 2024	277,103,703
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	277,103,703

Terdapat mutasi tambah atas aset tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 berupa Dokumen Acuan Metode Kerja sebesar Rp11.552.899. Sedangkan Mutasi kurang atas aset

tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 adalah reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan berupa Bahan Perpustakaan Tercetak senilai Rp32.734.010.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap (Rp
77.640.339.900)*

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp77.640.339.900) dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	97.260.876.937	76.038.843.031	21.222.033.906
2	Gedung dan Bangunan	10.113.788.525	1.596.434.364	8.517.354.161
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.500.000	5.062.505	62.437.495
4	Aset Tetap Lainnya	277.103.703	0	277.103.703
Akumulasi Penyusutan		107.719.269.165	77.640.339.900	30.078.929.265

*Aset Tak
Berwujud
Rp820.490.099*

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp820.490.099 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya berupa Software Komputer dan Dokumen Acuan Metode Kerja. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	25,102,397
Transfer Masuk	936,077,202
Mutasi kurang:	-
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	140,689,500
Saldo per 31 Desember 2024	820,490,099
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(795,387,702)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	25,102,397

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	795,387,702
Dokumen Acuan Kerja	25,102,397
Jumlah	820,490,099

Terdapat mutasi tambah atas aset tak berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 berupa Dokumen Acuan Metode Kerja sebesar Rp25.102.397. Sedangkan Mutasi kurang atas aset tak berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 adalah reklasifikasi dari aset tak berwujud ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan berupa software komputer sebesar Rp140.689.500.

*Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp91.530.000*

C.11 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi Penggunaannya berasal dari transaksi RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun) dimana BAST nya telah dicatat pada tahun 2024 namun proses pembayarannya dilakukan pada tahun 2025. BAST transaksi RPATA BPAFK Surabaya adalah tanggal 31 Desember 2024 dan SP2D pembayarannya tanggal 03 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	No BAST	Tgl BAST	NILAI RPATA	No SP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D Pembayaran
1	PENGADAAN JASA PENGEMUDI	BJ.01.04/E.X/7557/2024	31-DEC-24	11,340,000	'259991302000403	'03-JAN-25	11,340,000
2	PENGADAAN JASA PETUGAS KEAMANAN	BJ.01.04/E.X/7556/2024	31-DEC-24	34,170,000	'259991302000405	'03-JAN-25	34,170,000
3	PENGADAAN JASA PETUGAS KEBERSIHAN	BJ.01.04/E.X/7558/2024	31-DEC-24	34,020,000	'259991302000404	'03-JAN-25	34,020,000
4	PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET	BJ.01.04/E.X/7555/2024	31-DEC-24	12,000,000	'259991301000301	'03-JAN-25	12,000,000
TOTAL				91,530,000	TOTAL		91,530,000

Aset Lain-Lain
Rp930.626.120

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp930.626.120 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	459,512,110
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	140,689,500
Transfer Masuk	330,424,510
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	930,626,120
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(897,892,110)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	32,734,010

Terdapat mutasi tambah atas aset lain-lain sampai dengan 31 Desember 2024 berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp459.512.110 dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional sebesar Rp140.689.500.

**Akumulasi
Penyusutan
Aset Lainnya**
(Rp1.693.279.812)

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp1.693.279.812) dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	820,490,099	795,387,702	25,102,397
Aset Lain-lain	930,626,120	897,892,110	32,734,010
Jumlah	1,751,116,219	1,693,279,812	57,836,407

**Utang kepada
Pihak Ketiga**
Rp
140.358.175

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp140.358.175 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Listrik Bulan Desember 2024 yang Masih Harus Dibayar	47,134,568	Proses pembayaran pada bulan Januari 2025
Belanja Telpn Bulan Desember 2024 yang Masih Harus Dibayar	122,647	Proses pembayaran pada bulan Januari 2025
Belanja Air Bulan Desember 2024 yang Masih Harus Dibayar	1,570,960	Proses pembayaran pada bulan Januari 2025
Belanja Jasa Pengemudi Bulan Desember 2024	11,340,000	Menggunakan mekanisme RPATA dan BAST tgl 31 Des 2024 sehingga proses pembayaran dilakukan pada bulan Januari 2025
Belanja Jasa Petugas Keamanan Bulan Desember 2024	34,170,000	Menggunakan mekanisme RPATA dan BAST tgl 31 Des 2024 sehingga proses pembayaran dilakukan pada bulan Januari 2025
Belanja Jasa Petugas Kebersihan Bulan Desember 2024	34,020,000	Menggunakan mekanisme RPATA dan BAST tgl 31 Des 2024 sehingga proses pembayaran dilakukan pada bulan Januari 2025
Belanja Jasa Langganan Internet Bulan Desember 2024	12,000,000	Menggunakan mekanisme RPATA dan BAST tgl 31 Des 2024 sehingga proses pembayaran dilakukan pada bulan Januari 2025
Total	140,358,175	

Ekuitas

Rp

30.760.134.628

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.760.134.628 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp19.410.289.2

63

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.410.289.263 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	19.372.040.310	0	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	173.000	0	#DIV/0!
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	38.075.953	0	#DIV/0!
Jumlah	19.410.289.263	0	#DIV/0!

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelaksanaan pengujian dan kalibrasi ke Fasyankes.

Nilai Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan pada LRA Pendapatan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp20.036.393.810. Sedangkan nilai Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp19.410.289.263. Rincian nilai Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

AKUN	URAIAN	Realisasi Menurut		SELISIH
		LRA Pendapatan TA 2024	Laporan Operasional TA 2024	
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	20.036.393.810	19.372.040.310	664.353.500
Jumlah		20.036.393.810	19.372.040.310	664.353.500

Jika realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan pada Laporan Operasional Per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan pada Laporan LRA Pendapatan Per 31 Desember 2024 terdapat selisih sebesar Rp664.353.500. Selisih tersebut merupakan nilai beban penyisihan piutang tidak tertagih TA 2024.

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp

11.973.780.406

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.973.780.406 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.757.889.000	0	#DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PNS	48.813	0	#DIV/0!
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	317.297.890	0	#DIV/0!
Beban Tunj. Anak PNS	82.646.142	0	#DIV/0!
Beban Tunj. Struktural PNS	17.640.000	0	#DIV/0!
Beban Tunj. Fungsional PNS	199.290.000	0	#DIV/0!
Beban Tunj. PPh PNS	59.741.029	0	#DIV/0!
Beban Tunj. Beras PNS	207.121.200	0	#DIV/0!
Beban Uang Makan PNS	333.622.000	0	#DIV/0!
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	540.125.000	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Umum PNS	137.615.000	0	#DIV/0!
Beban Gaji Pokok PPPK	407.416.000	0	#DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PPPK	7.125	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	31.475.600	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Anak PPPK	8.404.608	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	52.220.000	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Beras PPPK	27.664.440	0	#DIV/0!
Beban Uang Makan PPPK	46.473.000	0	#DIV/0!
Beban Uang Lembur	67.828.000	0	#DIV/0!
Beban Uang Lembur PPPK	3.293.000	0	#DIV/0!
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5.130.321.111	0	#DIV/0!
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	545.641.448	0	#DIV/0!
Jumlah	11.973.780.406	0	#DIV/0!

Nilai realisasi belanja Pegawai pada LRA Per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp 11.973.780.406, sedangkan beban Pegawai pada Laporan Operasional Per 30 Desember 2024 adalah Rp11.973.780.406. Adapun rinciannya sebagai berikut:

URAIAN	LRA TW 3 TA 2024	LO TW 3 TA 2024	SELISIH
Beban Gaji Pokok PNS	3.757.889.000	3.757.889.000	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	48.813	48.813	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	317.297.890	317.297.890	0
Beban Tunj. Anak PNS	82.646.142	82.646.142	0
Beban Tunj. Struktural PNS	17.640.000	17.640.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	199.290.000	199.290.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	59.741.029	59.741.029	0
Beban Tunj. Beras PNS	207.121.200	207.121.200	0
Beban Uang Makan PNS	333.622.000	333.622.000	0
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	540.125.000	540.125.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	137.615.000	137.615.000	0
Beban Gaji Pokok PPPK	407.416.000	407.416.000	0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	7.125	7.125	0
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	31.475.600	31.475.600	0
Beban Tunjangan Anak PPPK	8.404.608	8.404.608	0
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	52.220.000	52.220.000	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	27.664.440	27.664.440	0
Beban Uang Makan PPPK	46.473.000	46.473.000	0
Beban Uang Lembur	67.828.000	67.828.000	0
Beban Uang Lembur PPPK	3.293.000	3.293.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5.130.321.111	5.130.321.111	0
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	545.641.448	545.641.448	0
Jumlah	11.973.780.406	11.973.780.406	0

Tidak terdapat selisih belanja Pegawai di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per 31 Desember 2024 dengan beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) Per 31 Desember 2024.

Beban
Persediaan
Rp
836.675.814

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp836.675.814 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
Per 31 desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	798,111,399	-	#DIV/0!
Beban Persediaan bahan baku	38,564,415	-	#DIV/0!
Jumlah	836,675,814	0	#DIV/0!

Realisasi Belanja Persediaan per 31 Desember 2024 menurut LRA TA 2024 sebesar Rp900.429.890. Sedangkan menurut Laporan Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp836.675.814. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan sampai dengan 31 Desember 2024 di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian perolehan nilai beban persediaan pada Laporan Operasional TA 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo awal persediaan TA 2024	807,595,192
Penambahan:	
- Pembelian /Realisasi Belanja Persediaan TA 2024	900,429,890
- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-
- Koreksi Nilai Persediaan	-
Pengurangan:	
- Persediaan TA 2024	672,197,131
- Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-
- Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	36,410,853
- Beban Persediaan Suku Cadang	162,741,284
Jumlah	836,675,814

*Beban Barang
dan Jasa
Rp4.451.612.434*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.451.612.434 dan Rp0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak

menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-24	31-Des-23	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.203.974.702,	0	#DIV/0!
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	414.102.814,	0	#DIV/0!
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	79.023.950,	0	#DIV/0!
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	108.248.000,	0	#DIV/0!
Beban Barang Operasional Lainnya	85.567.000,	0	#DIV/0!
Beban Bahan	74.434.000,	0	#DIV/0!
Beban Honor Output Kegiatan	55.760.000,	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional Lainnya	398.398.880,	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	40.000.000,	0	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	575.789.900,	0	#DIV/0!
Beban Langganan Telepon	7.072.368,	0	#DIV/0!
Beban Langganan Air	18.904.320,	0	#DIV/0!
Beban Jasa Konsultan	60.661.500,	0	#DIV/0!
Beban Sewa	7.900.000,	0	#DIV/0!
Beban Jasa Profesi	54.400.000,	0	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	1.267.375.000,	0	#DIV/0!
Jumlah	4.451.612.434	0	#DIV/0!

Realisasi belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 adalah sebesar Rp4.449.882.126.000, sedangkan Realisasi belanja Barang dan Jasa pada Laporan Operasional TA 2024 adalah sebesar Rp4.451.612.434. Berikut perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 dan LO TA 2024.

*Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa
per 31 Des 2024 Menurut LO dan LRA*

URAIAN	LO TA 2024	LRA TA 2024	SELISIH
Beban Keperluan Perkantoran	1.203.974.702	1.203.974.702	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	414.102.814	414.102.814	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	79.023.950	79.023.950	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	108.248.000	108.248.000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	85.567.000	85.567.000	-
Beban Bahan	74.434.000	74.434.000	-
Beban Honor Output Kegiatan	55.760.000	55.760.000	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	398.398.880	398.398.880	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	40.000.000	40.000.000	-
Beban Langganan Listrik	575.789.900	573.760.661	2.029.239
Beban Langganan Telepon	7.072.368	7.306.799	(234.431)
Beban Langganan Air	18.904.320	18.968.820	(64.500)
Beban Jasa Konsultan	60.661.500	60.661.500	-
Beban Sewa	7.900.000	7.900.000	-
Beban Jasa Profesi	54.400.000	54.400.000	-
Beban Jasa Lainnya	1.267.375.000	1.267.375.000	-
Jumlah	4.451.612.434	4.449.882.126	1.730.308

Terdapat selisih sebesar Rp1.730.308 dari hasil perbandingan antara realisasi belanja barang dan jasa di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2024 dengan realisasi belanja barang dan jasa di Laporan Operasional (LO) TA 2024. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Barang dan Jasa TA 2024	4.449.882.126
Penambahan:	
- Langganan Listrik Bulan Desember TA 2024 yang masih harus dibayar	47.134.568
- Langganan Telepon Bulan Desember TA 2024 yang masih harus dibayar	122.647
- Langganan Air Bulan Desember TA 2024 yang masih harus dibayar	1.570.960
Pengurangan:	
- Pembayaran langganan Listrik Bulan Desember TA 2023	(45.105.329)
- Pembayaran Langganan Telepon Bulan Desember TA 2023	(357.078)
- Pembayaran langganan Air Bulan Desember TA 2023	(1.635.460)
Jumlah	4.451.612.434

Beban
Pemeliharaan
Rp
2.261.783.420

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.261.783.420 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	488,422,640	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,574,208,643	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	36,410,853	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Suku Cadang	162,741,284	0	#DIV/0!
Jumlah	2,261,783,420	0	#DIV/0!

Realisasi belanja Pemeliharaan pada LRA TA 2024 adalah sebesar Rp2.062.631.283, sedangkan Realisasi belanja pemeliharaan pada LO TA 2024 adalah sebesar Rp2.261.783.420. Berikut perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan pada LRA TA 2024 dan LO TA 2024

*Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan
per 31 Des 2024 Menurut LO dan LRA*

URAIAN	LO TA 2024	LRA TA 2024	SELISIH
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	488,422,640	488,422,640	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,574,208,643	1,574,208,643	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	36,410,853	0	36,410,853
Beban Persediaan suku cadang	162,741,284	0	162,741,284
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	-
Jumlah	2,261,783,420	2,062,631,283	199,152,137

Terdapat selisih sebesar Rp199.152.137 dari hasil perbandingan antara realisasi belanja pemeliharaan di LRA TA 2024 dengan realisasi belanja barang dan jasa di LO TA 2024. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	36,410,853
Beban Persediaan suku cadang	162,741,284
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	199,152,137

**Beban
Perjalanan
Dinas
Rp
4.851.940.726**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.851.940.726 dan Rp0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,472,572,357	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	112,500,000	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	297,172,826	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	969,695,543		
Jumlah	4,851,940,726	0	#DIV/0!

Realisasi belanja Perjalanan Dinas pada LRA TA 2024 adalah sebesar Rp4.851.940.726, sedangkan beban belanja perjalanan dinas pada LO TA 2024 adalah sebesar Rp4.851.940.726. Berikut perbandingan Realisasi Belanja

Perjalanan Dinas pada LRA TA 2024 dan Beban Perjalanan Dinas pada LO TA 2024

Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Perjalanan Dinas per 31 Des 2024 Menurut LO dan LRA

URAIAN	LO TA 2024	LRA TA 2024	SELISIH
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,472,572,357	3,472,572,357	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112,500,000	112,500,000	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	297,172,826	297,172,826	-
Beban Persediaan suku cadang	969,695,543	969,695,543	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	-
Jumlah	4,851,940,726	4,851,940,726	-

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat selisih antara realisasi belanja perjalanan dinas di LRA TA 2024 dengan beban belanja perjalanan dinas di LO TA 2024.

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

**Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp6.482.277.989**

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.482.277.989 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,256,558,720	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	224,031,769	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Irigasi	1,687,500	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,482,277,989	-	#DIV/0!

**Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp664.353.500)**

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp664.353.500) dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	(664,353,500)	0	#DIV/0!
Jumlah	(664,353,500)	0	#DIV/0!

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp572.584.201
)*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp572.584.201) dan Rp0. Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 merupakan jumlah dari beban pelepasan Aset sebesar Rp599.772.000 Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp27.187.799. Berikut rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar :	(599.772.000)	0	#DIV/0!
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	599.772.000	0	#DIV/0!
Surplus dari Kegiatan Non Operasional :	27.187.799	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	6.525.987	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	20.661.812	0	#DIV/0!
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
defisit dari Kegiatan Non Operasional	(572.584.201)	0	#DIV/0!

)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp27.187.799 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu . Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2023 sebesar Rp1.575.087 dan Pengembalian Tunjangan Umum Tahun 2023 sebesar Rp4.950.900. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu merupakan pengembalian kelebihan belanja perjalanan dinas TA 2023 sebesar Rp20.661.812. Beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp599.772.000 merupakan nilai konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang berasal dari nilai Perencanaan pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu 3 Lantai BPFK Surabaya yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca per 31 Desember 2013. KDP tersebut sudah dinyatakan untuk tidak dilanjutkan pekerjaannya oleh KPA melalui surat pernyataan Tanggal 30 Maret 2017 dan telah diproses hapus pada Aplikasi SAKTI modul aset tetap Periode 13 BPAFK Surabaya TA 2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : HK.02.03/E.VII/1345/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain pada satuan kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tanggal 17 Desember 2024.

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Defisit LO

(Rp11.356.012.227)

E.1 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp 11.356.012.227) dan Rp0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar

Entitas

Rp42.116.146.855

E.2 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp42.116.146.855 dan Rp0. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(20,101,830,562)
Ditagihkan ke Entitas Lain	28,582,930,862
Transfer Masuk	33,635,046,555
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	42,116,146,855

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.2.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp20.101.830.562) sedangkan DKEL sebesar

Rp28.582.930.862. Ditagihkan dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp20.101.830.562) merupakan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Desember 2024. Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp28.582.930.862 merupakan realisasi anggaran belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja s.d. 31 Desember 2024.

E.2.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sebesar Rp33.635.046.555 merupakan perpindahan aset/kewajiban dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya kepada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

E.2.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Ekuitas Akhir

Rp

30.760.134.628

E.3 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 30.760.134.628 dan Rp0. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp 30.900.492.803 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp140.358.175.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Proses Likuidasi

Pada tanggal 31 Mei 2024 telah dilakukan serah terima saldo Aset, Kewajiban dan Ekuitas dari satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya ke satker Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai BAST No. KN.01.06/E.X/2915/2024 tanggal 31 Mei 2024 (terlampir).

F.2.2 KDP

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 di Neraca sebesar Rp599.772.000 merupakan nilai dari Perencanaan pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu 3 Lantai BPFK Surabaya yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca per 31 Desember 2013. KDP tersebut sudah dinyatakan untuk tidak dilanjutkan pekerjaannya oleh KPA melalui surat pernyataan Tanggal 30 Maret 2017. KDP tersebut telah diproses hapus pada Aplikasi SAKTI modul aset tetap Periode 13 BPAFK Surabaya TA 2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : HK.02.03/E.VII/1345/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain pada satuan kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Surabaya Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tanggal 17 Desember 2024.

No	URAIAN	LOKASI	NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	% Pengerjaan	NILAI Pengerjaan	KET
1	Gedung 3 Lt Terpadu	Surabaya	PL.00.06.02.1.3.24	635.965.000	80%	599.772.000	RM

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : KN.01.06/E.X/2915/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Dr. Wahyudi Ifani, ST, M.Si
NIP : 197211181999031003
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya per 31 Desember 2023

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dengan kode Satuan Kerja 024.04.0500.552713.000.KD yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : Dr. Wahyudi Ifani, ST, M.Si
NIP : 197211181999031003
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Entitas Akuntansi dengan kode Satuan Kerja 024.07.0500.690805.000.KD yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima saldo neraca dalam rangka pelaksanaan likuidasi Entitas Akuntansi Satuan Kerja Kantor Daerah di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima atas saldo neraca sesuai dengan neraca sebesar Rp33.682.144.422 (Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) berupa Persediaan, Aset, dan Utang, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab atas pengelolaan saldo neraca sesuai Pasal 1 menjadi tanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dengan kode Satuan Kerja 024.07.0500.690805.000.KD.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Dr. Wahyudi Ifani, ST, M.Si
NIP 197211181999031003

PIHAK KEDUA

Dr. Wahyudi Ifani, ST, M.Si
NIP 197211181999031003

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : KN.01.06/E.X/2915/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Dr. Wahyudi Ifani, ST, M.Si
NIP : 197211181999031003
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya per 31 Desember 2023

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dengan kode Satuan Kerja 024.04.0500.552713.000.KD yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : Dr. Wahyudi Ifani, ST, M.Si
NIP : 197211181999031003
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Entitas Akuntansi dengan kode Satuan Kerja 024.07.0500.690805.000.KD yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima saldo neraca dalam rangka pelaksanaan likuidasi Entitas Akuntansi Satuan Kerja Kantor Daerah di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima atas saldo neraca sesuai dengan neraca sebesar Rp33.682.144.422 (Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) berupa Persediaan, Aset, dan Utang, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab atas pengelolaan saldo neraca sesuai Pasal 1 menjadi tanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dengan kode Satuan Kerja 024.07.0500.690805.000.KD.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



Dr. Wahyudi Ifani, ST, M.Si
NIP 197211181999031003



Dr. Wahyudi Ifani, ST, M.Si
NIP 197211181999031003

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : KU.04.01/E.X/ 2916/2024

Laporan Keuangan Terakhir Satuan Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 31 Mei 2024
Kepala Balai Pengamanan Alat
Dan Fasilitas Kesehatan Surabaya



Dr. Wahyudi Ifani ST. M.Si
NIP197211181999031003

KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN
DAN ALAT KESEHATAN

NOMOR : HK.02.03/E.VII/1354/2024

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KARENA SEBAB-SEBAB LAIN
PADA SATUAN KERJA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS
KESEHATAN SURABAYA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN
DAN ALAT KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa barang milik negara pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan berupa tanah dan/atau bangunan telah disetujui untuk dilakukan penghapusan sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya Nomor S-343/KM.6/KNL.1001/2024 tanggal 01 November 2024 Hal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara Karena Sebab-Sebab Lain pada Satuan Kerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/155/2023 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya, Kuasa Pengguna Barang dan Pimpinan Unit Kerja Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN.

KESATU : Menghapus barang milik negara tanah dan/atau bangunan berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Satuan Kerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.599.772.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya.
- KETIGA : Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya segera membuat laporan pelaksanaan penghapusan dan disampaikan kepada:
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan u.p. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
 - b. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - c. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - d. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan u.p. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya; dan
 - e. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penghapusan atas barang milik negara ditindaklanjuti baik dalam pembukuan maupun pelaporannya dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,



HERI RADISON

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.

Nomor : HK.02.03/E.VII/1354/2024
Tanggal : 17 Desember 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP) PADA SATUAN KERJA
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA DIREKTORAT
JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	NUP	Nilai Perolehan	Alasan Penghapusan
1	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	1	599.772.000	KDP yang tidak bisa dilanjutkan pengerjaannya
JUMLAH					599.772.000	

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

HERI RADISON